

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA (SIDUGA)  
PADA BKKBN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TESIS**



Oleh

**J U M A L I**

**NPM. 051801003**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**M E D A N**

**2007**

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA (SIDUGA)  
PADA BKKBN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TESIS**

Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)  
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

**J U M A L I**

**NPM. 051801003**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**M E D A N**

**2007**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Implementasi Sistem Informasi Kependudukan Dan Keluarga  
(SIDUGA) Pada BKKBN Provinsi Sumatera Utara

**N a m a** : Jumali

**N I M** : 051801003

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Drs. Heri Kusmanto, MA**

  
**Drs. Kariono, MA**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**

**Direktur**

  
**Drs. Kariono, MA**

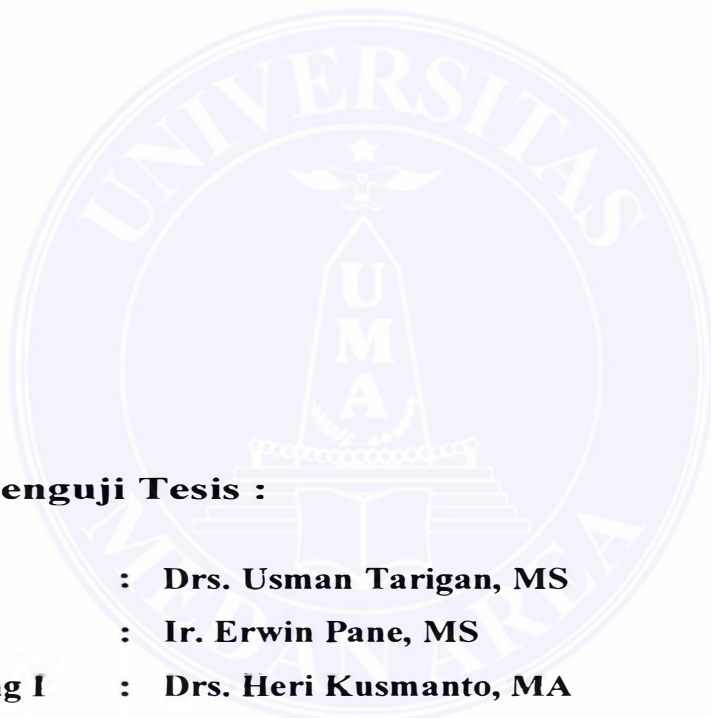
  
**Drs. Heri Kusmanto, MA**



**Telah diuji pada Tanggal 7 Mei 2007**

---

---



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua** : Drs. Usman Tarigan, MS  
**Sekretaris** : Ir. Erwin Pane, MS  
**Pembimbing I** : Drs. Heri Kusmanto, MA  
**Pembimbing II** : Drs. Kariono, MA  
**Penguji Tamu** : Drs. Agus Suriadi, MSi

# A B S T R A K

## IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENDUDUK DAN KELUARGA PADA BKKBN PROVINSI SUMATERA UTARA

N A M A : Jumali  
N I M : 051801003  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Pembimbing I : Drs. Heri Kusmanto, MA  
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Dalam rangka menetapkan berbagai kebijakan pemerintahan dan pembangunan baik pada tingkat konseptual maupun pada tingkat operasional, diperlukan adanya berbagai data dan informasi yang akurat, mutakhir, tepat dan cepat sejalan dengan tingkat perkembangan yang semakin maju. Diantara berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut, aspek penduduk merupakan salah satu data yang pokok dan mendasar, di samping data dan informasi lainnya. Hampir semua rencana pembangunan memerlukan data tentang penduduk dengan berbagai karakteristiknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) pada BKKBN Propinsi Sumatera Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SIDUGA. Sampel diambil secara *purposive sampling*, sebanyak 72 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif.

Implementasi Kebijakan SIDUGA pada BKKBN Propinsi Sumatera Utara dilihat dari input, proses, output dan out comes kebijakan SIDUGA, secara umum telah berjalan dengan baik, namun apabila dilihat dari masing-masing variabel kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan implementasi SIDUGA tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Kebijakan SIDUGA pada BKKBN Propinsi Sumatera Utara adalah faktor politik, kelembagaan dan perkembangan teknologi. Untuk lebih meningkatkan tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan SIDUGA pada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, maka : Perlu dilakukan berbagai upaya dan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terutama dalam era otonomi adalah dukungan dana, tenaga dan sarana dalam pelaksanaan pendataan keluarga yang masih sangat berkurang.

Key words : *implementasi kebijakan, Sistem Informasi, Kependudukan dan Keluarga*

..

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Adapun judul Tesis ini adalah “Implementasi Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) pada BKKBN Propinsi Sumatera Utara ”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H.M. Yakob Mantondang, MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Heri Kumanto, MA, Direktur PPs Magister Administrasi Publik, sekaligus sebagai pembimbing I
3. Bapak Drs. Kariono, MA, Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, sekaligus sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis .
4. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS, Pemabantu Direktur II PPs UMA, yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis .
5. Bapak Drs. Imam Haryadi, M.Sc, Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN ,atas dorongan secara terus-menerus untuk melanjutkan studi pasca sarjana



6. Bapak Drs. H. Bunyamin, M.Si, Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Utara atas Izin Belajar yang diberikan serta dorongan moril demi kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
7. Bapak Drs. Temazaro Zega, M.Kes Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Propinsi Sumatera Utara atas motivasi dan rekomendasinya.

Terimakasih pula kepada ibunda Bariah dan ibu mertua Siti Mariam Br Sembiring yang telah mendoakan agar perkuliahan lancar dan cepat selesai. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada istri tercinta Rubiah Hanum Purba dan anak-anaku tersayang Dini Marhayani, Ananada Laksono dan Andika Sari yang telah memberi semangat agar Papanya segera dapat menyelesaikan studi ini, demikian juga Abangda Wagiman, Ridwan Purba, SE dan keluarga, adikda Dra. Anawati Purba, M.Si dan keluarga yang tidak pernah putus memberikan semangat dan do'a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga bantuan dan amal sholeh mereka semua mendapat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wataala, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, 7 Mei 2007

**P e n u l i s**

**J u m a l i**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAKSI .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xiv

### **BAB I : PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Hasil Penelitian .....	6

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Kebijakan Publik .....	7
2.1.1. Pengertian kebijakan Publik .....	7
2.1.2. Proses Analisis kebijakan Publik .....	11
2.1.3. Implementasi kebijakan.....	17
2.2. Sistem Informasi Kependudukan dan keluarga (SIDUGA).....	25
2.2.1. Elemen Pokok .....	25
2.1.1. Tujuan & Kebijaksanaan dan Strategi.....	26
2.3. Pelaksanaan E-Government (INPRES NO.3/2003)..	29



<b>BAB III</b>	<b>: METODE PENELITIAN</b>	
3.1.	Bentuk Penelitian .....	31
3.2.	Populasi Sasaran.....	31
3.3.	Sampling.....	31
3.4.	Teknik Pengumpulan .....	32
3.5.	Operasionalisasi Variabel .....	33
3.6.	Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV</b>	<b>: GAMBARAN UMUM SUMATERA UTARA</b>	
4.1.	Sejarah Provinsi Sumatera Utara .....	35
4.2.	Letak Geografis Provinsi Sumatera Utara .....	38
4.3.	Keadaan kependudukan .....	42
4.3.1.	Jumlah dan Komposisi Penduduk .....	42
4.3.2.	Rasio Jenis kelamin .....	44
4.3.3.	Persebaran Penduduk .....	47
4.4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	53
4.5.	Perekonomian.....	61
4.6.	Ketenagakerjaan .....	69
4.6.1.	Angkatan Kerja .....	70
4.6.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ...	78
4.6.3.	Tingkat Pengangguran .....	82
4.7.	Administrasi Pemerintahan .....	86
4.8.	Profil Keluarga Sumatera Utara Hasil Pendataan Tahun 2006 .....	89
4.8.1.	Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin .....	91
4.8.2.	Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan	94
4.8.3.	Kepala Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan ..	96
4.8.4.	Kepala Keluarga Menurut Status Pekerjaan .	98

4.8.5.	Perkembangan Jumlah Jiwa .....	100
4.8.6.	Jumlah Jiwa Menurut Kelompok Umur dan Status Bersekolah.....	102
4.9.	Profil Keluarga Berencana Sumatera Utara.....	105
4.9.1.	Pasangan Usia Subur Menurut Umur Isteri..	106
4.9.2.	Jumlah Wanita Usia Subur .....	110
4.9.3.	Peserta KB .....	112
4.9.4.	Jalur Pelayanan KB .....	114
4.9.5.	Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB....	116
4.10.	Tahapan Keluarga Sejahtera .....	118
4.11.	Perkembangan Keluarga Miskin.....	123

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA**

5.1.	Hasil Penelitian .....	129
5.2.	Karakteristik Responden.....	129
5.3.	Variabel Penelitian.....	131
5.3.1.	Input Kebijakan SIDUGA.....	132
5.3.2.	Proses Kebijakan SIDUGA.....	137
5.3.3.	Output Kebijakan SIDUGA .....	140
5.3.4.	Outcomes Kebijakan SIDUGA.....	146
5.4.	Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi SIDUGA .....	149
5.4.1.	Faktor Politik .....	149
5.4.2.	Faktor Kelembagaan.....	152
5.4.3.	Faktor Perkembangan Teknologi.....	154

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1. Kesimpulan .....	157
6.2. Saran-Saran.....	158

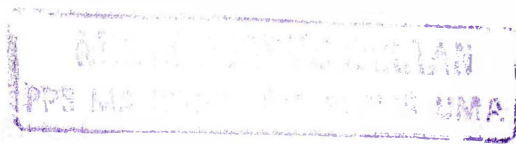
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>160</b>
----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

NO. TABEL	JUDUL TABEL	Hal.
4.1	Luas Wilayah dan Letak Di Atas Permukaan Laut Sumatera Utara Menurut Kabupaten/ Kota .....	40
4.2	Luas Wilayah Sumatera Utara Menurut Kabupaten /Kota.....	41
4.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2005 .....	43
4.4	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten/Kota 2005 .....	46
4.5	Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 2005.....	51
4.6	Jumlah Penduduk Menurut Daerah Kota dan Pedesaan Dan Kabupaten/Kota 2005.....	52
4.7	Posisi IPM Provinsi di Indonesia, 2004 .....	54
8.8	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten Kota, 2005 .....	55
4.9	Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2003-2005 .....	61
410	Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Menurut Sudut Penggunaan Atas Dasar HargaBerlaku 2003-2005 .....	64
4.11	Kondisi Makro Sosial Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2003-2004 dan Kondisi yang Diharapkan Tahun 2005-2009.....	65
4.12	Perbandingan Inflasi di Sumatera Utara dan Nasional Februari 2004-2005.....	66

4.13	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar/Sedang Menurut Golongan Menurut Industri 2004 (Unit).....	68
4.14	Banyaknya Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan 2001-2004 (Jiwa).....	70
4.15	Banyaknya Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur.....	71
3.16	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2004-2005.....	72
4.17	Persentase Angkatan Kerja Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kelamin Dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 2005.....	73
4.18	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Seminggu Yang Lalu 2005 (Jiwa)....	75
4.19	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja selama seminggu yang lalu menurut Kab/Kota , dan kelompok Lapangan Usaha 2005.....	76
4.20	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2004-2005.....	77
4.21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota.....	80
4.22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/kota.....	84
4.23	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun dan RT Menurut Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2006.....	87
4.24	Jumlah Kepala Keluarga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 .....	90
4.25	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin .....	93



4.26	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan .....	95
4.27	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan, 2006.	97
4.28	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Pekerjaan .....	99
4.29	Jumlah Jiwa Dalam Keluarga dan Sex Rasio .....	101
4.30	Jumlah Jiwa Menurut Kelompok Umur .....	103
4.31	Perkembangan PUS Sumatera Utara 1995-2006 .....	106
4.32	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan PUS dan Bukan PUS	107
4.33	Jumlah PUS Menurut Kelompok Umur Sumatera Utara,2006.	109
4.34	Jumlah KK, WUS, PUS dan Rata-rata Balita S.Utara, 2006	111
4.35	Jumlah PUS dan Peserta KB , 2006.....	112
4.36	Peserta KB Menurut Jalur Pelayanan Tahun 2006.....	115
4.37	Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Tahun 2006.....	117
4.38	Persentase Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Keluarga , 2006.....	121
4.39	Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Keluarga Tahun 2006 2006.....	122
4.40	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera I Tahun 2006.	126
5.1	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin.....	129
5.2	Distribusi Responden Menurut Umur .....	130
5.3	Distribusi Responden Menurut Pendidikan .....	130
5.4	Distribusi Responden Menurut Kedudukan dalam Program.....	131
5.5	Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumberdaya Manusia dalam Implementasi SIDUGA.....	132

5.6	Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumberdaya Teknologi dalam Implementasi SIDUGA.....	133
5.7	Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumberdaya Keuangan dalam Implementasi SIDUGA.....	134
5.8	Dukungan Dana APBD Kabupaten Kota Tahun 2006.....	135
5.9	Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumberdaya Sarana dan Prasarana dalam Implementasi SIDUGA.....	136
5.10	Pendapat Responden Tentang Komunikasi dan Koordinasi antara Instansi terkait dalam implementasi SIDUGA .....	137
5.11	Pendapat Responden Tentang Keterpaduan Komponen Pelaksana Dalam implementasi SIDUGA.....	139
5.12	Pendapat Responden Tentang Kejelasan Informasi Yang dihasilkan dari Website BKKBN.....	144
5.13	Pendapat Responden Tentang Nilai dan Kualitas Informasi Yang dihasilkan dari E-Government BKKBN.....	145
5.14	Pendapat Responden Tentang Manfaat Implementasi SIDUGA.....	146



## DAFTAR GAMBAR

NO. TABEL	JUDUL GAMBAR	Hal.
4.1	Peta Provinsi Sumatera Utara .....	39
4.2	Persentase Persebaran Penduduk dan Luas Wilayah .....	49
4.3	Persentase Persebaran Penduduk Menurut Desa – Kota 2001, 2006 .....	50
4.4	Peta Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota , 2005 .....	53
4.5	Angka Harapan Hidup Kabupten Kota Sumatera Utara, 2005 .....	56
4.6	Angka Melek Huruf Kabupten Kota se-Sumatera Utara, 2005 .....	57
4.7	Rata-rata Lama Sekolah Kabupten Kota Sumatera Utara, 2005 .....	58
4.8	Pengeluaran Ril Per Kapita Kabupaten Kota Sumatera Utara, 2005 .....	59
4.9	Peta Penyebaran IPM Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara .....	60
4.10	Perkembangan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2003-2005 (Milyar Rp.) .....	62
4.11	Peta Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten / Kota Atas Dasar Harga Konstan 1993 - 2003 .....	67
4.12	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2005 .....	72
4.13	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan, 2005 .....	74

4.14	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut lapangan Pekerjaan Utama, 2005 .....	78
4.15	Peta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota , 2005 .....	79
4.16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota , 2005 .....	81
4.17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2003 -2005 .....	83
4.18	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara Menurut Kabupaten Kota, 2005, .....	85
4.19	Peta Banyaknya Desa/Kelurahan Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005 .....	88
4.20	Jumlah KK Menurut Kabupaten/Kota, 2006 .....	90
4.21	Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin .....	92
4.22	Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan .....	94
4.23	Kepala Keluarga Menurut Pendidikan .....	96
4.24	Kepala Keluarga Menurut Status Pekerjaan .....	97
4.25	Jumlah Jiwa Menurut Kelompok Umur .....	104
4.26	Kepala Keluarga Menurut Status PUS .....	105
4.27	Persentase PUS Terhadap Jumlah Jiwa .....	107
4.28	Persentase PUS Menurut Kelompok Umur .....	110
4.29	Jumlah Keluarga, WUS dan PUS, 2006 .....	110
4.30	Persentase Peserta KB Terhadap PUS .....	112
4.31	Jalur Pelayanan KB .....	114

4.32	Alasan Tidak Ber KB .....	116
4.33	Perkembangan Jumlah Keluarga Sumatera Utara 1994 - 2004 .....	119
4.34	Persentase Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Keluarga, 2006 .....	121
4.35	Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Alasan Ekonomi 1995-2004 .....	124
4.36	Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera & Sejahtera I	127
4.37	Peta Penyebaran Keluarga Pra S + KS I Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara .....	128
5.1	Proses SIDUGA-net .....	138

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menetapkan berbagai kebijakan pemerintahan dan pembangunan baik pada tingkat konseptual maupun pada tingkat operasional, diperlukan adanya berbagai data dan informasi yang akurat, mutakhir, tepat dan cepat sejalan dengan tingkat perkembangan yang semakin maju. Diantara berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut, aspek penduduk merupakan salah satu data yang pokok dan mendasar, di samping data dan informasi lainnya. Hampir semua rencana pembangunan memerlukan data tentang penduduk dengan berbagai karakteristiknya.

Pentingnya data penduduk dalam berbagai kegiatan pembangunan tersebut karena selain sebagai objek, penduduk sekaligus sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Data dan informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek kependudukan sangat menentukan terhadap tingkat kecermatan setiap penetapan kebijakan, penyusunan rencana pembangunan dan keberhasilan pembangunan.

Mengingat akan pentingnya data penduduk tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna peningkatan kualitas data yang dihasilkan. Data dan informasi di lingkungan BKKBN mendapat perhatian utama dengan ditunjuknya pejabat Eselon I yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bidang Informasi. Tugas dan Fungsi tersebut dapat terlihat dari tugas dan fungsi Eselon II di lingkungan bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Program yang disusun berdasar tahap/proses dimulai dari pengumpulan (pelaporan dan statistik, pengolahan dan pengembangan teknologi informasi, analisis dan evaluasi program, diseminasi dan dokumentasi serta pemaduan kebijakan program.

Oleh karena itu pembentukan dan pembangunan bank data keluarga berencana saat ini merupakan asset dan komoditi yang dapat dipergunakan untuk

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan utamanya upaya penanggulangan kemiskinan. Sistem dan mekanisme yang ada utamanya dengan pendayagunaan teknologi informasi adalah menjadi modal dasar BKKBN untuk turut melaksanakan *e government* sesuai dengan INPRES No.3 tahun 2003.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan desentralisasi menuntut persebaran urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom sebagai badan hukum publik. Dalam persebaran urusan pemerintahan ke Pemerintah Daerah dilandasi dengan prinsip dalam kerangka NKRI. Otonomi yang diberikan ke Pemerintah Daerah mengandung arti bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepada mereka. Tugas dan kewajiban tersebut menyangkut penyelenggaraan dan pengembangan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, pengembangan lingkungan yang demokratis, adil dan merata, serta menjaga hubungan yang harmonis antara Pemerintah [Pusat] dan Pemerintah Daerah.

Keputusan Presiden No. 103 tahun 2000, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND). Pada Pasal 43 Kepres 103/2001 tersebut ditetapkan bahwa BKKBN mempunyai peran sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepres tersebut dalam pasal-pasalnya juga menyatakan bahwa Penyerahan sebagian Kewenangan sudah selesai diserahkan paling lambat tanggal 31 Desember 2003. Penyerahan kewenangan tersebut harus diikuti dengan penyerahan P3D (Peralatan, Personil, Pembiayaan dan Dokumentasi). Selanjutnya tentang kedudukan dan fungsi BKKBN Propinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam Kepres No.9 tahun 2004 pasal 114 ayat (2) bahwa Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN di Kabupaten/Kota dan Propinsi DKI Jakarta diserahkan kepada Pemerintah Daerah terhitung mulai 1 Januari 2004. Dan selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan bahwa Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN Propinsi, selain Propinsi DKI Jakarta, tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sampai ada ketentuan lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara, 2004. *Profil Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana 1994-2004 Provinsi Sumatera Utara*. Medan : Kerja sama Pempropsi dengan BKKBN
- Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara, 2007. *Hasil Pendataan keluarga 2006 Provinsi Sumatera Utara*. BKKBN
- Biro Pusat Statistik. 2001. *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001. Menuju Konsensus Baru: Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jakarta : bekerja sama dengan Bappenas dan UNDP Indonesia.
- Biro Pusat Statistik : “ *Penduduk Miskin dan Desa Tertinggal 1993 : Metodologi dan Analisis*” , Jakarta, 1994.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2004. *Sumatera Utara Dalam Angka 2004*. Medan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2006 *Sumatera Utara Dalam Angka 2006*. Medan.
- Breman, Jan. 2001. *A Question of Poverty. Valedictory Address as Professor of Development Sociology at the Institute of Social Studies*, The Hague, The Netherlands. Amsterdam, October, 25.
- Dewanta, Awan Setya (ed), 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Departemen Kesehatan, 1998, *Pedoman Pelaksanaan Program Jaring Perlindungan Sosial (Social Protection Sector Development Programmer)*, Jakarta : Depkes.
- Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 1996, Panduan Pembangunan keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta : Meneg. Kependudukan, Bappenas, Depdagri.
- Haryanto, Rohadi dan Tomagola, Tamrin Amal, 1997, “ Indikator Keluarga Sejahtera “, dalam *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Nomor 2, September 1997, hal. 25-49.
- Internasional Labour Force, 1976, *Employment, Growth, and Basic Needs. Report of Director General of ILO and Declaration of Principle and Programs for Action Adopted by the Counference. Geneva.*
- Islam, Iyanatul. 2001. *Identifying the Poorest of the Poor in Indonesia: Towards A Conceptual Framework*. Working Paper: 02/02 Jakarta: UNSFIR.



- Nugroho, Heru, 1997. “ Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan “ dalam : *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta : Aditya Media, hal. 25-36.
- Nelayan, Deepa, et. Al. 2002. *Voices of The Poor; Can Anyone Hear Us?* New York: Oxford University Press.
- Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. 2002. *Pedoman Penelitian Survei Governance dan Desentralisasi 2002*. Yogyakarta: PSKK UGM-PEG USAIDUNDP-World Bank.
- Rusli, Said, dkk, 1995, *Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin : Suatu Tujuan dan Alternatif*, Jakarta : Grasindo.
- Sen, Amartya, 1981, *Proverty and Families : An Essay on Entitlement and Deprivation*, Asford : Calendron Press.
- Sajogyo, 1996. Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia. Jakarta: Grasindo.
- Surbakti, Pajung. 1995. *Survei sosial ekonomi Nasional: Suatu Sumber Data Berkesinambungan Untuk Analisis Kesejahteraan Rakyat di Indonesia*. Jakarta: BPS. *Judul Asli : Indonesia's National SocioEconomic Survey: A Continual Data Source for analysis on Welfare Development*. Penerjemah: Dwi Harwin K., dkk.
- Thomas, Vinold, dkk., 2001. *The Quality of Growth (Kualitas Pertumbuhan)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Perumusan Nasional Strategi Penanggulangan Kemiskinan. 2002. *Dokumen Sementara Strategi Penanggulangan Kemiskinan* September.
- UNDP, 2004 *Human Development Report 2004 Deepening Democracy in a Fragmented World*. New York : Oxford University Press.
- William N.Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua: Gajah Mada University Press., 1999.
- Inu Kencana Syafiie, Djameludin Tanjung, Supardan Madeong, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, 1999
- Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya : Insan Cendikia, 2001